

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Joga Soroti Kondisi Rusunawa

## Palmerah, Warta Kota

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyoroti kondisi bangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Jakarta yang saat ini kondisinya banyak yang memprihatinkan.

Usia yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun membuat bangunan rusun tersebut mengalami kerusakan di sana-sini serta tampak usang dan kotor. Tak hanya lantaran usia bangunan yang makin tua, sistem kelola yang kurang baik serta perilaku kurang menjaga fasilitas dan kebersihan juga memperparah kondisi bangunan rusunawa.

Seperti diketahui, atap Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ambruk menimpa kanopi dan sejumlah hunian warga sekitar pada Rabu (30/8/2023) lalu. Beruntung tak ada korban luka maupun meninggal dalam peristiwa tersebut.

Dampaknya, Rusunawa Marunda Blok C1 sampai C5 dikosongkan. Sebanyak 451 kepala keluarga (KK) direlokasi ke Rusun Nagrak, Cilincing dan Rusun Padat Karya Muara Angke, Penjarangan, Jakarta Utara. Hal ini guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan mengingat kondisi gedung yang diduga kuat sudah mulai rapuh.

"Pemprov DKI harus segera mengaudit atau mengevaluasi seluruh rusun yang dimiliki DKI, untuk mengetahui kondisi terkini bangunan gedungnya, tingkat huniannya, ketepatan sasaran penghuninya, maupun bagaimana pengelolaannya selama ini," kata Joga kepada Warta Kota, Minggu (1/10/2023).

Untuk rusun yang kondisinya sudah kurang layak, lanjutnya, harus segera diputuskan apakah cukup dengan renovasi atau harus

dilakukan revitalisasi. Jika pun harus dilakukan revitalisasi, maka Pemprov DKI dapat memikirkan lebih lanjut, terkait pembangunan ulang dengan bangunan yang kekinian dan ramah lingkungan.

"Bagi rusun yang sudah buruk kondisinya harus segera diputuskan, apakah cukup direnovasi atau direvitalisasi, atau harus dibongkar dan dibangun ulang dengan arsitektur bangunan gedung rusun kekinian, yang lebih modern, segar, dan ramah lingkungan," ujar Joga.

Di sisi lain, Joga menilai Pemprov DKI harus tetap membangun lebih banyak hunian vertikal seperti rusun bagi masyarakat yang terdampak pembangunan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

## Ketinggalan zaman

Hal senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah. Menurutnya, Pemprov DKI harus segera melakukan peremajaan atau renovasi total terhadap Rusun yang ada di bawah pengelolaannya. Hal itu lantaran Rusun di Jakarta dilihatnya sudah ketinggalan zaman. Maka, perlu ada perbaikan dari Pemprov DKI Jakarta karena sangat membahayakan para penghuni khususnya anak-anak.

"Nggak sehat juga untuk penghuninya, jadi mempengaruhi kesehatan lingkungan," ungkapnya belum lama ini.

Pemerintah Provinsi, lanjutnya, harus memberikan anggaran kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI untuk melakukan renovasi. Mengingat peremajaan Rusun terakhir atau dibangun ketika era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ahok itu kerjasama dengan dunia usaha, dari Sedayau, Ciputra, Lippo diwajibkan bangun Rusun, sebagai bentuk CSR kegiatan sosial. Namun, untuk perawatannya sudah bukan CSR lagi, Pemprov sendiri yang harus merawat," paparnya.

Dosen Universitas Trisakti ini juga menyoroti uang sewa Rusun yang terlalu

mahal, sehingga banyak warga yang nunggak bayar.

"Sewanya perlu dievaluasi supaya masyarakat mau menyewa, sekarang ini orang untuk urbanisasi ke Jakarta kan menurun juga," tuturnya.

## Perbaikan berlanjut

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pihaknya kan memperbaiki unit-unit rusunawa yang rusak. Ia bakal menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman untuk memperbaikinya.

"(Rusun) Yang rusak kita perbaiki, nanti kita akan bahas lebih detail," kata Heru di Balai Kota, Senin (25/9/2023).

Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta ketika dikonfirmasi mengungkap, ada ribuan unit rumah susun (Rusun) yang rusak sehingga perlu diperbaiki. Seluruh unit itu tersebar di 40 lokasi Rusun yang ada di lima Kota Jakarta.

"Kurang lebihnya yang belum bisa dihuni (karena rusak) itu sekitar 1.000-an, tersebar di 40 lokasi (Rusunawa)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPRKP Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyoningrum usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Meski demikian, Retno menyebut pemerintah daerah masih terus berupaya memperbaiki Rusun yang rusak tersebut. Diharapkan, proses perbaikan bisa selesai akhir tahun sehingga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum yang membutuhkan atau masyarakat terprogram relokasi.

"Kan lagi berproses nih, masih ada perbaikan-perbaikan dan mudah-mudahan kelar (selesai) sampai Desember," kata Retno.

Menurut dia, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran perawatan dan perbaikan terhadap Rusun yang ada. Untuk alokasi anggaran di tiap rusun berbeda-beda, karena tergantung

pada tingkat kerusakan yang ada.

"Kami kan masih UPT (Unit Pelaksana Teknis), jadi penganggarannya itu T-1, misalnya untuk anggaran 2024 direncanakan atau diusulkan di tahun 2023 ini," paparnya.

Seingatnya, dinas mengalokasikan anggaran perawatan dan perbaikan tiap Rusun berkisar Rp 2 miliar - Rp 3 miliar.

## Kebersihan lingkungan

Kerusakan Rusun, ungkap dia, disebabkan beberapa faktor dan kebanyakan karena ulah dari si penghuni itu sendiri.

"Kalau pemeliharaan memang rutin dilakukan, kayak misalnya harus ada perbaikan. Tapi di sisi lain, umur bangunan juga mempengaruhi (kerusakan)," tuturnya.

Di sisi lain, Retno mengaku, pihak Unit Pelaksana Rumah Susun (UPRS) sering mengedukasi para penghuni agar ikut merawat huniannya sehingga lebih awet digunakan. Dari edukasi yang terkecil adalah menjaga kebersihan lingkungan Rusun.

"Kalau masalah bangunan itu memang rutinitas dilakukan, nah ini kadang-kadang masyarakat masukin pembalut bekas dan tidak sengaja celana masuk, sehingga saluran jadi mampet dan menimbulkan kebocoran," jelasnya.

Dia menambahkan, para penghuni rusun dapat mengajukan perbaikan jika terdapat kerusakan di unitnya kepada pihak UPRS. Jika ada perbaikan kecil maka teknisi akan memperbaikinya.

"Misal kebocoran, itu harus dilibab, kebocorannya kayak gimana. Kalau kebocorannya karena mampet, bisa ditangani oleh teknisi, tapi kalau kebocorannya itu di bagian atap kan perlu ada alokasi khusus untuk bisa dilakukan perbaikan," paparnya.

Saat ini Pemprov DKI sedang mengadakan lelang proyek untuk pembangunan Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tercatat ada tiga tower dengan masing-masing memiliki 225 unit, sehingga totalnya ada 675 unit. (m41/m26/faf)

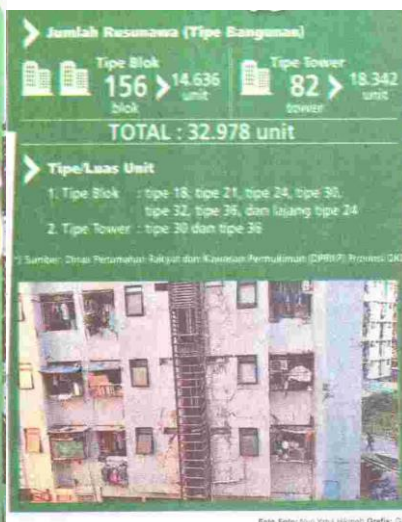
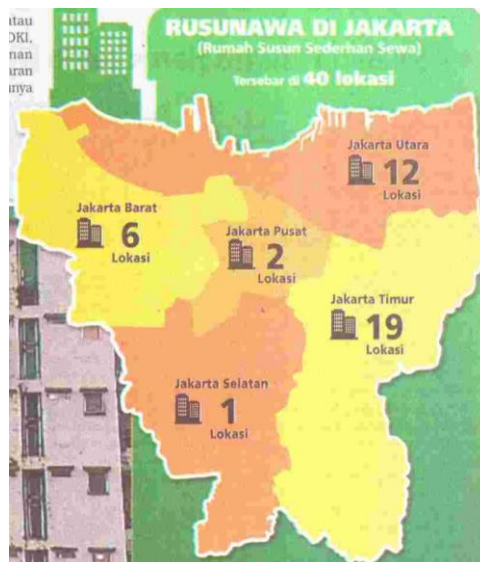


Foto: Foto: Non Yuni Huma Grafik: Gal